



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KINERJA  
TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERU HERMAWANTO

Jabatan : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

Jabatan : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

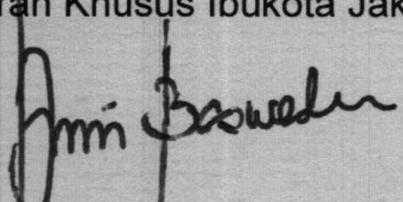
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2020

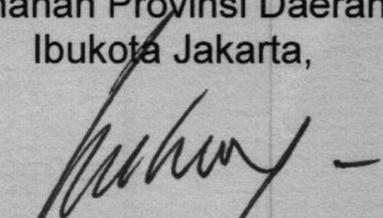
PIHAK KEDUA,

Gubernur Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

  
ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang  
dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

  
HERU HERMAWANTO  
NIP 196803121998031010

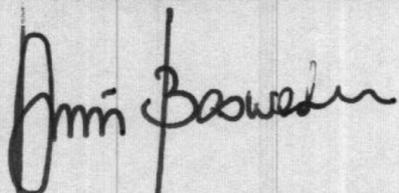
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN**  
**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	40%
2	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	56%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda	401.558.650.948	APBD Provinsi DKI Jakarta
2	Program Penataan Ruang	20.542.632.318	APBD Provinsi DKI Jakarta
3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	1.020.543.073	APBD Provinsi DKI Jakarta
4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	74.261.714.281	APBD Provinsi DKI Jakarta

Jakarta, 31 Januari 2020

Gubernur Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang  
Dan Pertanahan Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta

Heru Hermawanto

NIP 196803121998031010

**RENCANA KINERJA TAHUN 2020**

**Nama** : Heru Hermawanto  
**NIP** : 196803121998031010  
**Jabatan** : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
**Unit Kerja** : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
<b>SASARAN STRATEGIS</b>											
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	1	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	e-SAKIP	Selisih antara rencana dengan implementasi dibagi dengan rencana, dengan menggunakan parameter subzona/kegiatan dan intensitas (KDB) sesuai perda RDTR & PZ	N/A	N/A	N/A	40%	40	Persentase
2	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	e-SAKIP	Rasio Gedung pemda sesuai standa pada kondisi akhir tahun dengan kondisi awal tahun. Gedung pemda memenuhi standar adalah bangunan gedung pemda sesuai fungsi dan layak secara struktur dan ME, yang dikelompokan menjadi : a. Bangunan gedung sederhana bertingkat paling tinggi 4 lantai yang berumur sampai dengan 25 tahun b. Bangunan gedung tidak sederhana bertingkat lebih dair 4 tahun yang berumur sampai dengan 25 tahun	N/A	N/A	N/A	56%	56	Persentase
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran diukur dari 3 Komponen yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja barang, belanja modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu belanja barang dan belanja modal yang telah ditetapkan di lingkungan perangkat daerah b. Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai. apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. hasil lebih sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk kegiatan /belanja lainnya c. pencapaian output : output belanja adalah output yang terdapat pada DPA perangkat daerah. realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran. formulasi pengukuran adalah sebagai berikut: capaian = (penyerapan anggaran X 40%) + (efisiensi X 10%) + (pencapaian output X 50%)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
4	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23)	100%	N/A	100%	100%	100%	Persentase
5	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Revitalisasi Pengembangan Sumber Daya Aparatur (nomor 64)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Revitalisasi Pengembangan Sumber Daya Aparatur (nomor 64)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
6	Meningkatnya pertumbuhan investasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	100%	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
7	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi (nomor 53)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi (nomor 53)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
8	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah (nomor 67)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah (nomor 67)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
9	Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas DKI Jakarta (nomor 70)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas DKI Jakarta (nomor 70)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	100%	100%	N/A	100%	100%	Persentase
11	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (nomor 28)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (nomor 28)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Fasilitas Park and Ride dan Optimalisasi Manajemen Perparkiran (nomor 35)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan Fasilitas Park and Ride dan Optimalisasi Manajemen Perparkiran (nomor 35)	N/A	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan (nomor 48)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan (nomor 48)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase
		4	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (nomor 31)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (nomor 31)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		5	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (nomor 30)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (nomor 30)	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
		6	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase

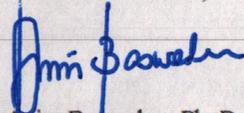
No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase

#### SASARAN KHUSUS

14	Terwujudnya Pengawasan dan penegakan peraturan zero run off di 5 wilayah	1	Persentase bangunan yang telah memiliki sarana pengendalian air hujan (zero run off)	E-Kinerja	- Pengertian Zero Run Off : Menahan air hujan tidak langsung ke saluran kota atau jalan - Output berupa pembuatan Sarana Pengendalian Air Hujan Lokasi: DI Panjaitan, Thamrin, Sudirman, Yos Sudarso, S. Parman Cara perhitungan: Jumlah Bangunan yang sudah memiliki sarana pengendalian air hujan dibagi Jumlah Seluruh Bangunan dalam lokus pemeriksaan dikali 100%	10%	25%	45%	80%	80%	Persentase
15	Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Bangunan Gedung Pemda	1	Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai SOP	E-Kinerja	Jumlah penyelesaian Peta Informasi Zonasi yang tepat waktu sesuai dengan SOP dibagi jumlah seluruh permohonan Peta Informasi Zonasi dikali 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
16	Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Trase	1	Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait trase yang tepat waktu sesuai SOP	E-Kinerja	Jumlah penyelesaian bangunan gedung pemda dan trase yang tepat waktu sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
17	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	E-Kinerja	Jumlah realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Paket
18	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	E-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	5%	10%	20%	30%	30%	Persentase
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	E-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	3	N/A	N/A	3	WTP

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
20	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	<p>a) Persentase penyusunan <i>communication plan</i> (strategi komunikasi) program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per tahun sesuai dengan PD masing-masing pada bulan April 2020. *Template <i>communication plan</i> mencakup minimal : Identifikasi masalah, Tujuan, Pesan Utama, Target Audience, Rencana Kegiatan dan Editorial plan *Verifikasi <i>communication plan</i> dilakukan oleh Asisten dibantu Diskominfo.</p> <p>b) Persentase penyusunan <i>calendar of events</i> dan <i>communication tools standard</i> untuk program umum dan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per triwulan sesuai dengan PD masing-masing. Diskominfo menyusun <i>calendar of events</i> dan <i>communication tools standard</i> di level Provinsi.</p> <p>c) Persentase penyusunan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis sesuai SOP yang disusun Diskominfo per triwulan.</p> <p>d) Persentase penyiapan bahan paparan Rapat Koordinasi Komunikasi Publik per bulan dan di Validasi oleh Tim Komunikasi yang dipimpin oleh Asisten.</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
<b>SASARAN OPERASIONAL</b>											
21	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	E-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
22	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
23	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Indeks
24	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	E-Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

  
Anies Baswedan, Ph. D.

Jakarta, 31 Januari 2020  
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta,

  
Heru Hermawanto  
NIP 196803121998031010